

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baik secara parsial maupun secara bersama-sama pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bab sebelum-sebelumnya. Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh uji t dengan hasil nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,698 > 2,013$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung positif berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh uji t dengan hasil nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-4,823 < -2,013$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung negatif berarti Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
3. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh uji t dengan hasil nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,142 > 2,013$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung positif berarti Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh uji F dengan hasil nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($55,886 > 2,807$), sehingga H_0 ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat:

1. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kemampuan desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya juga meningkatkan. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pemanfaatan pendapatan asli daerah yang sudah ada secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan ekonomi daerahnya. Produktivitas yang meningkat dapat menciptakan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat dan kinerja keuangan daerah juga meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu untuk mengurangi dana perimbangan sehingga tingkat ketergantungan keuangan daerah menurun. Pemanfaatan dana perimbangan yang sudah ada secara efektif dan efisien untuk membantu menutupi kekurangan dalam pembiayaan kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan ekonomi daerahnya diharapkan akan berdampak pada periode-periode selanjutnya. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan juga mampu mengurangi kebutuhan dana transfer yang didapatkan pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, maka semakin kecil peran dana perimbangan yang dibutuhkan. Sehingga tingkat ketergantungan daerah menurun dan kinerja keuangan daerah meningkat.
3. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu untuk meningkatkan alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dan efisiensi belanja daerah. Infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat dan pemerintah menjadi lebih mudah melakukan aktivitasnya. Sehingga peningkatan alokasi belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Belanja daerah yang dialokasikan secara efisien dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi di dalamnya juga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Penelitian
 - a. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu 5 tahun anggaran dan terbatas pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat saja, sehingga hasil penelitian kurang akurat jika digunakan pada populasi yang lebih luas.
 - b. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal saja, mengingat masih banyak faktor lain yang juga memengaruhi kinerja keuangan daerah.
 - c. Penelitian ini hanya terbatas pada 3 rasio keuangan dan 2 rasio belanja daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah, mengingat masih banyak rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

2. Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun anggaran, dapat menambah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel, dapat menambah variabel yang lebih banyak, dan dapat menambah rasio keuangan, sehingga hasil penelitian akan lebih valid.

